

**IMPLEMENTASI PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAL IKHWAL  
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA TERHADAP KELUARNYA PERPU  
NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DHARI>'AH***

**SKRIPSI**

Oleh :

**Restu Minal Faizin**  
**NIM. C85214066**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restu Minal Faizin

Nim : C85214066

Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Hal  
Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Terhadap  
Keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang  
Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif  
*Sadd al-Dhari'ah*

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara  
keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang  
dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2018

Yang membuat pernyataan.



RESTU MINAL FAIZIN  
C85214066

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Restu Minal Faizin C85214066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2018

Dosen Pembimbing



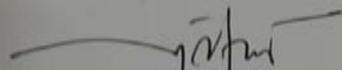
Suyikno, S.Ag. MH.  
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

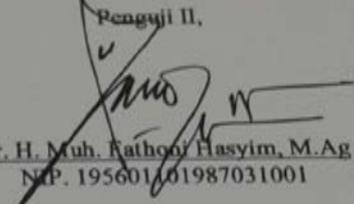
Skripsi yang ditulis oleh Restu Minal Faizin NIM. C85214066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

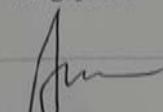
Penguji I,

  
Suyikro, M.H.  
NIP. 1973070522011011000

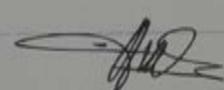
Penguji II,

  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601061987031001

Penguji III,

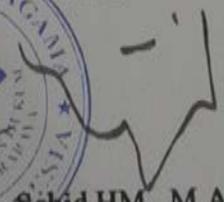
  
Saqki, M.H.I.  
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

  
Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.  
NIP. 195511181981031003

Surabaya, 09 Februari 2017  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Restu Minal Faizin  
NIM : C85214066  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : RestuRemifa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA TERHADAP KELUARNYA PERPU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DHARIAH***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Februari 2018

Penulis



(RESTU MINAL FAIZIN)  
nama terang dan tanda tangan











































































































mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui penambahan frasa tersebut, sebenarnya yang dilakukan pemerintah terkait pembaharuan definisi mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila masih dirasa bias. Sebab, hingga saat ini belum ada parameter mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi. Hal tersebut di satu sisi jelas dapat menindak Ormas yang hendak merongrong NKRI, namun di sisi lain dikhawatirkan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam Ormas yang berseberangan dengan pemerintah dikarenakan tidak adanya parameter mengenai paham yang bertentangan dengan pemerintah.

Hal tersebut berkaitan dengan berkembangnya paham radikal yang tidak terlepas dari keberadaan Ormas radikal dan Ormas yang menjual paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut ditengarai dari banyaknya kasus persekusi yang dilakukan oleh beberapa Ormas yang kemudian diikuti dengan ujaran-ujaran kebencian yang menjaral di media sosial yang kemudian dapat menjadi sarang untuk berkembangnya teroris melalui literatur internet dan media sosial dari andil beberapa Ormas. Oleh karena hal ini, dalam kondisi yang sangat mendesak, terdapat beberapa Ormas radikal, Ormas yang menjual ide-ide paham-paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, sehingga Pemerintah harus melakukan tindakan yang cepat. Hal tersebut menjadi dalih untuk "kegentingan yang memaksa" dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2017 dimana Pemerintah dalam menanggapi kondisi tersebut berdaulat secara politik dan bergerak cepat dalam rangka melindungi bangsa dari Ormas yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Dalih atas "kegentingan yang memaksa" tersebut dapat dikaitkan dengan ciri keadaan mendesak (*emergency*) dan terdapatnya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*).









tugas dan kewenangannya masih tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan kewajiban serta larangan dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Namun, perbedaannya terdapat tambahan larangan dalam Pasal 51 serta dalam Penjelasan Pasal 59 mengenai perluasan definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Perbedaan lainnya adalah Ormas yang melanggar ketentuan yang terdapat diatas, dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.<sup>109</sup>

Perbedaan sanksi administratif mengenai peringatan tertulis adalah tidak adanya tahapan hingga 3 peringatan tertulis. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan hanya diberikan satu (1) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.<sup>110</sup> Terkait sanksi administratif dalam Perppu tersebut, terdiri atas:<sup>111</sup>

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian kegiatan; dan/atau
3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Kemudian, dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan diatas, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.<sup>112</sup> Apabila dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksudkan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

---

<sup>109</sup> Lihat Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>110</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



1. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

#### **F. Dasar Pertimbangan Terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dicantumkan hak-hak setiap warga Negara sebagai bentuk perlindungan Pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, di dalam rangka perlindungan hak asasi manusia tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain. Penegasan mengenai perlindungan hak

asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok *Declaration on Human Right 1993*.

Berdasarkan Deklarasi HAM ASEAN di Bangkok tersebut menegaskan bahwa Deklarasi HAM Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan yang bersifat regional dan nasional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran Deklarasi HAM Universal tidak seharusnya ditafsirkan dan diwujudkan secara bertentangan dengan ketiga latar belakang dimaksud. Perkembangan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan, baik dari aspek nasional, regional, maupun internasional telah membedakan perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan normal dan dalam keadaan darurat. Di dalam hukum nasional, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan beberapa Undang-Undang lain terkait perlindungan hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang merupakan keadaan yang mengecualikan perlindungan hak asasi manusia. Pengecualian tersebut











2. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
3. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
4. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

Berdasarkan konsideran Perpu No. 2 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2017 telah memenuhi unsur hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Unsur yang terpenuhi diantaranya:

1. Pertama, unsur kebutuhan yang mendesak atau mengharuskan (*reasonable necessity*), dimana dalam hal ini dibutuhkan pengaturan yang jelas terkait tentang ajaran dan tindakan Organisasi

Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila. Ajarannya adalah ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang terkait yang ada tetapi tidak memadai. Sebelum lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017, Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Akan tetapi UU No. 17 tahun 2013 dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administratif berupa surat keterangan terdaftar dan mencabut status badan hukum atau membatalkannya bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Akhirnya, Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan ada Undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum.
3. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Berkembangnya paham radikal yang tidak terlepas dari keberadaan Ormas radikal dan Ormas yang menjual paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut ditengarai dari banyaknya kasus persekusi yang dilakukan oleh beberapa Ormas yang kemudian diikuti dengan ujaran-ujaran kebencian yang menjalar di media sosial yang kemudian dapat

menjadi sarang untuk berkembangnya teroris melalui literatur internet dan media sosial dari andil beberapa Ormas. Oleh karena hal ini, dalam kondisi yang sangat mendesak, terdapat beberapa Ormas radikal, Ormas yang menjual ide-ide paham-paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, sehingga Pemerintah harus melakukan tindakan yang cepat. Keadaan tersebut dikategorikan sebagai dalam hal kegentingan atau keadaan yang mendesak yang memerlukan penanganan dengan secepatnya dan memaksa pemerintah untuk segera diatasi karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan Undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam, sedangkan Perpu pembentukannya dengan jangka waktu terbatas dan secepat mungkin harus dimintakan persetujuan DPR. Selain unsur kegentingan yang memaksa pembentukan Perpu tidak pernah lepas dari subjektivitas Presiden dalam pembentukannya. Maka presiden mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah untuk melindungi negara kita dari radikalisme yang ingin mengganti kedaulatan negara Indonesia. Untuk merespon kegentingan yang memaksa, dimana ada ajaran radikalisme yang telah masuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dengan cara mempropoganda kebencian di dunia nyata maupun media sosial, melakukan aksi-aksi kekerasan yang bertentangan dengan pancasila. Dan dengan munculnya perpu ini untuk menghindari organisasi masyarakat ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya anti Pancasila.

Perpu No 2 tahun 2017 Perubahan atas Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 juli 2017 tersebut merupakan penyempurnaan atas









dan undang-undang dasar negara republik indonesia. Pada awalnya organisasi masyarakat tersebut dibolehkan dan didukung karena peran ormas sangat penting dalam membentuk bangsa ini merdeka dari penjajahan, namun ada organisasi yang melanggar terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 (*mafsadah*) Maka pelanggaran tersebut termasuk perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia.

Keluarnya Perpu yakni maka harus dinilai dari *kemaslahatannya* maupun *kemafsadatannya*. Berdasarkan dari kemaslahatannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menghindari Pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Untuk segera dilakukan perubahan karena belum ada aturan mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif
4. Adanya organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Belum adanya Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang.

Adapun *kemafsadatannya* yakni tindakan dan ajaran ormas yang sewenang-wenang, menimbulkan kericuan, mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan demikian Perspektif *Sadd al-Dhari>'ah* terhadap Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentinan yang memaksa merupakan cara yang sesuai. Menetapkan peraturan baru yakni Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berisi tentang hukum larangan atas perbuatan ormas yang pada dasarnya diperbolehkan (ada peraturan tetapi tidak memadai) di dalam UU No. 17 Tahun 2013 untuk mencegah dan memberi sanksi terhadap ajaran dan tindakan ormas yang tujuannya bertentangan dengan pancasila dan UUD NRI 1945. \







- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman. *al-Asybah wa aL-Nazhair fi Qawa'id wa Furu fiqh al-Syafi'i, Cet.1.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399H/1979 M.
- Bello, Petrus X.K.L. *Ideologi Hukum Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum.* Bogor: Insan Merdeka, 2013.
- Bin Muhammad Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Terjemah syarmin syakur* juz 2.
- Bin Muhammad Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith,* Terjemah Nasrun Haroen (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz 7.
- Bin Muhammad Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar,* Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz 5.
- Bin, Muhammad Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab,* (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3.
- Bin Muhammad Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Farida Maria Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2* ,yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lawrence Neuman, W. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* Boston: Allyn & Bacon, 2000.
- Mahmud Marzuki, Piter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahfud , Moh MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahfud Moh MD . *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Manan, Bagir. *Dasar Perundang-undangan Indonesia,* Jakarta: Ind-Hill-Co. 1992.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan(Dasar-dasar dan Pembentukannya),* Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Jiid I,*Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mustafa, Zainan. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Najieh Ahmad. *Fiqih.* Jakarta: Pustaka, 1985

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1999.
- Syarifudin Amir. *ushul fiqh jilid 2*, Jakarta: Logos wacana ilmu, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty. 1990
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti UndangUndang (PERPU)*. Malang:UMMPress, 2003.
- Triwulan Titik Tutik, *Pokok-pokok hukum tata negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Darurat Praktek*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1996.
- Yahya Mukhtar dan fatchurrohman, *Dasar-dasar pembinaan hukum islam : fiqh islami*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Yasin Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh (dasar-dasar istinbat hukum islam)*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Yuswalina dan Budianto,Kun. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sjarif Amiroedidin , *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Zuhaili Wahbah, *ushul al- fiqh al-islami, jilid 2* Beirut : Daar al-fikr, 1986.



